

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Achmad Zulfikri Sumantri

NPP. 29.1932.

Asdaf Kota Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: fikri047@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This study examines the policies of the local government of Sumenep Regency in suppressing the high poverty rate.

Purpose: The purpose of this study was to find out how the implementation of the Sumenep Regency Government's policies in Poverty Alleviation and to see from the inhibiting and supporting factors and the efforts made to overcome the obstacles to policy implementation. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The focus in this research is to use the theory of Merille

S. Grindle, namely related interests, types of benefits obtained, desired changes, location of decision making, program implementers and resources used to implement policies. **Result:** Based on the results of the study, it is shown that the implementation of local government policies in Sumenep Regency has been running effectively, this can be seen from the achievement of social welfare development goals and the decreasing poverty rate over the last 3 years. There are supporting and inhibiting factors in the implementation of the Sumenep Regency local government policies in poverty alleviation. The supporting factors are Human Resources which are quite good in order to expedite the implementation of poverty alleviation policies in Sumenep Regency and also the availability of existing facilities in the related OPD. While the inhibiting factor is the low understanding of the community in administrative order. **Conclusion/Sugegestion:** Efforts made in overcoming obstacles for the sake of realize the implementation of this policy, namely the Social Service Sumenep Regency will of course always carry out socialization to the community that the importance of this program in addition to reducing poverty rate but also to improve social welfare the people of Sumenep Regency.

Keywords: *Implementation, Poverty Reduction Policy, Socialization*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam penekanan tingginya angka kemiskinan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan serta dilihat dari faktor penghambat dan pendukung dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Merille S. Grindle yaitu kepentingan-kepentingan terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sudah berjalan secara efektif, hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dan semakin berkurangnya angka kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam pengentasan kemiskinan. Faktor pendukungnya yaitu Sumber Daya Manusia yang cukup baik dalam rangka melancarkan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep dan juga tersedianya fasilitas yang ada di OPD terkait. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam tertib administrasi. **Kesimpulan dan Saran:** Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan demi mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan ini yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sumenep tentunya akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya program ini selain mengurangi tingginya angka kemiskinan namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, Sosialisasi*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu bentuk contoh masalah sosial berdasarkan faktor ekonomi yang menjadi masalah serius disetiap wilayah dunia termasuk yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Indonesia sendiri adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dan jumlah penduduknya sebanyak 270.203.917 jiwa. Dengan banyaknya penduduk Indonesia yaitu sekitar 270 juta lebih menyebabkan negara ini memiliki masalah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 BPS (Badan Pusat Statistika) menjelaskan bahwa sebanyak 24,79 juta orang penduduk Indonesia termasuk kedalam jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019, ditinjau dari kurun waktu selama 4 tahun, jumlah penduduk miskin secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,77 persen, tahun 2017 berada pada angka 26,58 persen,

tahun 2018 berada pada angka 25,67 persen, dan pada tahun 2019 berada pada angka 24,79 persen, dengan data yang telah diperoleh dapat dinyatakan pemerintah Indonesia mampu dan berhasil dalam melakukan upaya penekanan masalah sosial dalam hal kemiskinan. Konstitusi negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa negara wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Landasan legalistik kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep dalam upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan Misi utama dalam RPJMD Sumenep 2016-2021 adalah menggarap fitrah SDM melalui instruksi, pelonggaran kesejahteraan dan pelonggaran kebutuhan yang erat kaitannya dengan Nawa Cita Presiden Jokowi, khususnya pada Cita kelima, secara khusus menggarap fitrah manusia. Keberadaannya melalui pelatihan dan pendampingan pemerintah daerah setempat sehingga individu dapat memiliki kemandirian ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan landasan legalistik dalam Perda No.2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bermaksud untuk menjamin jalannya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Sumenep telah membuat banyak kemajuan terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, terbukti berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sumenep jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir yaitu, pada tahun 2015 sebanyak 225.500 jiwa, tahun 2014 sebanyak 218.860 jiwa, tahun 2015 sebanyak 216.840 jiwa, tahun 2016 sebanyak 216.140 jiwa, dan tahun 2017 sebanyak 211.920 jiwa. Pada tahun 2017 itu sendiri presentase penduduk miskin mencapai 19,62 persen dari jumlah total penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.081.204 jiwa. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirancang oleh Bupati Sumenep di jabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep berupa sasaran, arah kebijakan program atau metode, kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya. Selaras dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan serta upaya untuk meningkatkan pembangunan bidang sosial terutama di Kabupaten Sumenep, Dinas Sosial memiliki beberapa program seperti program pemberdayaan keluarga miskin, program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar, program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sumenep memiliki tujuan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 5 (lima) Tahun. Merujuk pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep periode 2016 – 2021, maka Dinas Sosial Kabupaten Sumenep merancang dan menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 tahun kedepan adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” yang indikator kinerjanya adalah angka kemiskinan dan penurunan masalah sosial. Yang menjadi sasaran jangka

menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan juga meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil.

Penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah telah bertahap meningkat cukup baik seiring berjalannya waktu. Namun demikian upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep memiliki masalah yang menjadi kendala atau masalah dalam proses pelayanan sosial, diantaranya: 1). Ruang lingkup atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas. 2). Masih minimnya pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat dalam rangka turut serta berpartisipasi melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat. 3). Kurangnya kesadaran dari gelandangan dan pengemis untuk mandiri yang masih menjadi budaya. Isu strategis yang muncul benar-benar harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, karena dampaknya yang sangat substansial di masa mendatang. Selain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jumlahnya sangat besar, timbul permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang harus dapat atensi atau perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumenep diantaranya, yaitu terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin rentannya masyarakat menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, dan masih rendahnya validitas dan akurasi data kemiskinan. Dengan mengamati uraian yang telah dipaparkan diatas sebaiknya dalam memaksimalkan program pengentasan kemiskinan perlu diperluasnya ruang lingkup atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial serta ditingkatkan dan dioptimalkan lagi sosialisasi kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dapat terjadinya pemerataan bantuan sosial sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang pertama Hasil Penelitian dari Adam Nirwana judul penelitian ANA LYSIS OF MSMES ENTREPRENEURS TAX COMPLIANCE RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF PP 23 OF 2018 (EMPIRICAL STUDY OF MSMES IN JABODETABEK) tujuan penelitian Untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti pengetahuan para anggota UMKM dalam menganalisis bagaimana kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak (pelaksanaan PP 23 tahun 2018) metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif perbedaan penelitian yaitu Membahas pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak khususnya pengusaha UMKM. Studi ini juga menemukan bahwa shadow economy mungkin dipengaruhi oleh kepatuhan pajak UMKM. Selanjutnya penelitian dari Romauliy Ferbiana Silitonga judul penelitian IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI tujuan penelitian Secara khusus yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan dari strategi penurunan angka kemiskinan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Metode penelitian

Deskriptif Kualitatif Perbedaan Penelitian Menganalisa pelaksanaan dari proses penerapan kebijakan penurunan angka kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya penelitian yang ketiga yaitu dari Apinus Janambani Judul Penelitian IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHANMUJA-MUJU KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA tujuan penelitiannya untuk menganalisis kekonsistensian pelaksanaan siklus/proses jalannya kebijakan pengentasan masalah sosial di kelurahan Muja-Muju dengan kendala dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian Kualitatif. Perbedaan penelitian Membahas tentang analisis program beserta hambatan dalam mengatasi masalah kemiskinan di kelurahan Muja-muju

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan

II. METODE

Pada penelitian ini di lihat dari data yang ada Pendekatan pemeriksaan yang akan digunakan untuk eksplorasi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam ulasan ini, para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini pada penemuan-penemuan tersebut tidak diperoleh melalui teknik-teknik terukur atau perkiraan-perkiraan lain. Berkaitan dengan eksplorasi ini, jenis pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan deskriptif, khususnya penelitian yang akan menjernihkan jawaban atas suatu isu terkini berdasarkan informasi yang ada. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Nazir, 2012) metode deskriptif adalah strategi dalam mengeksplorasi situasi dengan pertemuan manusia, sekelompok kondisi, susunan pemikiran, atau kelas kejadian di masa sekarang. Prinsip pada penelitian kualitatif memiliki sifat alamiah atau natural. Dikatakan penelitian kualitatif natural karena di lapangan situasinya bersifat natural atau wajar, seperti apa adanya, tidak ada manipulasi di lapangan, diatur dengan eksperimen. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis. Namun, hanya akan mengetahui kondisi sesuatu tidak akan menghubungkan satu ke lainnya secara metodis, dengan cara ini spesialis menggunakan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, teknik subjektif adalah strategi eksplorasi yang menghasilkan informasi ekspresif sebagai kata-kata yang disusun dan diungkapkan dari individu dan perilaku yang diperhatikan. Sejalan dengan itu, cenderung dianggap bahwa penelitian kualitatif adalah strategi yang digunakan dalam objek pemeriksaan karakteristik, di mana ilmuwan adalah kuncinya, metode pengumpulan informasi diselesaikan oleh analisis secara bersama-sama, penyelidikan informasi bersifat induktif, dan konsekuensi dari penelitian ini lebih signifikan dalam spekulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam penanggulangan kemiskinan oleh Bantuan Sosial Kota Sumenep, para peneliti menggunakan hipotesis Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Dengan ini, penelitian yang digunakan pencipta mengacu pada bagian II, khususnya penelitian seperti yang ditunjukkan oleh Grindle. Pelaksanaan strategi menurut Merilee S. Grindle terdiri dari faktor dan penanda yang terdiri dari konten strategi yang petunjuknya adalah: kepentingan yang kuat, jenis keuntungan, tingkat kemajuan yang diharapkan, bidang arahan, pelaksana program, aset yang digunakan dan iklim pelaksanaan yang juga memiliki beberapa penanda. Misalnya, kekuasaan, kualitas pembentukan atau sistem kekuasaan, dan tingkat konsistensi. Sehingga cenderung dianggap bahwa Merilee S. Grindle dapat mensurvei hasil dari suatu pelaksanaan suatu perjanjian dengan melihat interaksinya, dengan memperhatikan apakah pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang belum seluruhnya diselesaikan, secara khusus melihat kegiatan tersebut. Proyek tugas individu dan juga apakah tujuan program telah tercapai. Memutuskan terkait dengan pelaksanaan pendekatan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya penulis akan membahas analisis di lapangan menurut teori tersebut.

1.1. Isi Kebijakan

Pada saat membuat suatu kebijakan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan, salah satunya adalah kebijakan dari strategi yang dibuat untuk menyikapi permasalahan kelompok yang direncanakan dari pengaturan yang telah ditentukan. Kebijakan suatu strategi merupakan utama dalam menentukan pencapaiannya, karena penyusunan tersebut dianggap berhasil dengan asumsi telah menyelesaikan tahapan tanpa henti memutuskan substansi pendekatan sebelum dilakukan. Dalam 49ocial ini, Merilee S. Grindle memaknai bahwa ada empat dalam substansi strategi, lebih spesifiknya: Sejauh mana kepentingan pengumpulan tujuan terkandung dalam substansi strategi. Untuk situasi ini, Bantuan Sosial Pemerintah Sumenep mengatur beberapa proyek, misalnya, program penguatan untuk keluarga tidak mampu, program bantuan dan pemulihan pemerintah. program perbaikan anak-anak yang diberhentikan, program pembinaan untuk individu yang tidak mampu dan cedera. Program ini secara eksplisit untuk membantu pendanaan dan pembinaan masyarakat miskin dan jaringan fakir miskin. Macam-macam keuntungan yang didapat dari pengumpulan objektif. Sejauh manfaat program penguatan keluarga tidak mampu, program bantuan dan pemulihan pemerintah, program peningkatan anak-anak yang diabaikan, program pelatihan untuk individu cacat dan cedera yang diberikan kepada jaringan penerima dapat dianggap berhasil dan berdaya, misalnya program penguatan untuk keluarga kurang mampu, program administrasi dan restorasi. Bantuan pemerintah program perbaikan anak-anak yang diberhentikan, program peningkatan untuk individu dengan cacat dan cedera. Bagaimanapun, ada beberapa proyek berbeda yang telah diberikan yang masih

belum ideal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, seperti belum adanya SDM ahli sebagai rekan sejawat, belum adanya sosialisasi dan belum adanya arahan atau aturan khusus dalam pelaksanaan program serta belum adanya kesadaran masyarakat dalam mengambil bagian dalam upaya menggarap bantuan 50 social pemerintah. Daerah setempat dalam iklim umum. Kemudian, pada saat itu, sebenarnya kendala dalam melaksanakan program bantuan pemerintah yang ramah bagi daerah adalah adanya kerangka organisasi pemerintah lingkungan yang tidak terkoordinasi dan bantuan yang kurang ideal dalam memberikan bantuan, karena keadaan geologi. Sejauh mana perbedaan ideal dalam suatu strategi. Pengaturan dibuat di dalam untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan dan target tertentu yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan bantuan pemerintah, tentunya strategi yang dilakukan oleh otoritas adalah untuk mencapai tujuan dan social dalam memahami bantuan pemerintah daerah, dengan tanda-tanda bantuan pemerintah yang telah diselesaikan sebelumnya. Pengaturan sebagai strategi administrasi adalah pilihan yang membatasi individu pada tingkat kunci atau kerangka kerja yang dibuat oleh investor spesialis pemerintah. Strategi pemerintah sebagai pilihan yang mengikat masyarakat umum kemudian harus dilakukan oleh para ahli politik, khususnya individu-individu yang mendapat perintah dari masyarakat umum atau populasi secara keseluruhan melalui interaksi diskresi untuk ditindaklanjuti bagi individu-individu pada umumnya. Titik prinsip dari strategi pemerintah di maju adalah bantuan yang merupakan semua yang dapat dilakukan untuk mengimbangi atau mengusahakan kepuasan pribadi individu. Apakah area suatu program sudah tepat. Mengingat dampak pemeriksaan terhadap bidang program untuk mengikutsertakan keluarga kurang mampu, program pemberian bantuan dan pemulihan, pembinaan anak terlantar, program pembinaan bagi individu yang tidak mampu dan cedera yang diselesaikan dalam Peraturan Sumenep, cenderung beralasan bahwa manfaat program bantuan pemerintah yang diberikan kepada jaringan penerima manfaat dapat diharapkan untuk menemukan keberhasilan yang langgeng dan sempurna. Dalam hipotesis Implementasi strategi, Merille S. Grindle juga menetapkan bahwa substansi strategi adalah apa yang tidak dapat disangkal signifikan dalam pelaksanaannya, di mana ia memerintahkan agar Implementasi strategi dapat berjalan dengan asumsi substansi pendekatan memiliki enam model, yaitu: kepentingan terkait, macam keuntungan yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, area navigasi, pelaksana program dan yang digunakan untuk melaksanakan pengaturan. Dalam menjalankan strategi pengentasan kemiskinan dalam Perda Sumenep, kita perlu melihat apakah program mitigasi kemiskinan telah memenuhi kelas konten strategi sesuai hipotesis Grindle.

1.1. Kepentingan-Kepentingan Yang Berkaitan

Kebijakan yang termasuk didalamnya ialah pedoman yang dibuat oleh otoritas untuk menentukan semua perselisihan di arena dan bentrokan dalam pemerintahan yang mencakup kepentingan pihak-pihak tertentu tanpa henti terkait dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Beberapa kepentingan yang terkait dengan strategi merupakan fundamental dari

pendekatan tersebut, misalnya daerah dan otoritas itu sendiri. Sebagian kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan strategi merupakan penanda yang berpendapat bahwa suatu pendekatan dalam pelaksanaannya pasti mencakup banyak kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan dokumentasi eksplorasi, pada tahun 2021 terdapat 224,73 individu, meningkat 4,5 ribu individu, dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 220,23 ribu individu. Tingkat orang miskin di Kota Sumenep juga meningkat dari 20,18 persen pada tahun 2020 menjadi 20,51 persen pada tahun 2021 atau naik 0,33 tempat. Garis kemiskinan dalam Perda Sumenep dalam tahun 2021 adalah Rp. . 400.960,- per kapita setiap bulan, ditambah Rp. 18.469,- per kapita setiap bulan atau naik 4,83 persen, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang mencapai Rp. 382.491,- per kapita setiap bulan. Selama periode tahun 2020 – tahun 2021, baik File Kemiskinan dan Kesenjangan Kebutuhan di Kota Sumenep secara umum akan meningkat. Tahun 2021 adalah 4,73, peningkatan 0,4 fokus dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara tahun 2021 adalah 1,56, peningkatan 0,26 fokus dibandingkan dengan tahun 2020. Dalam eksplorasi ini, analisis mengarahkan wawancara dengan narasumber mendapatkan beberapa informasi tentang bagaimana membuat daerah saat ini di Kabupaten Sumenep tersebut untuk ikut serta berpartisipasi dalam program membangun kesejahteraan sosial ini, seperti apa yang menjadi alasan ataupun yang melatar belakangi masyarakat Kabupaten Sumenep tersebut untuk bekerja guna menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan ini. Sesuai dengan konsekuensi data, cenderung terlihat bahwa pelaksanaan Strategi Mitigasi Kebutuhan di Kota Sumenep tidak banyak kepentingan. Pencipta mengartikan bahwa tanda-tanda kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan strategi pelonggaran kebutuhan ini belum berjalan secara ideal. Sampai saat ini, pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan ini belum melihat kepentingan pelaksana dan tercapainya tujuan.

1.2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Dalam point Content of Policy yang merupakan isi kebijakan menurut pendapat Merilee S Grindle berusaha menunjukkan dan memaknai bahwa dalam suatu pendekatan harus ada beberapa macam keunggulan yang menunjukkan efek positif dari pelaksanaan strategi yang akan dilakukan. Sebuah rencana yang pasti memberikan keuntungan nyata bagi banyak penghibur akan lebih mudah dilakukan daripada strategi yang tidak bermanfaat. Pengaturan yang disahkan oleh otoritas publik seperti proyek, pedoman, atau peraturan sebagai premis yang sah harus memberikan sesuatu yang bermanfaat, memiliki efek positif dan dapat meningkatkan dari efek samping pelaksanaannya. Semua pengaturan harus merupakan ikhtiar atau ikhtiar dari otoritas publik untuk memperbaiki sesuatu bahkan dan memiliki pilihan untuk mengurus masalah yang ada dan berharga. Suatu pengaturan biasanya memiliki info atau hasil yang positif atau negatif, hal ini erat kaitannya dengan reaksi yang diberikan oleh objek pendekatan. Apalagi

dengan dijalankannya strategi keringanan kebutuhan ini, pengaturan ini merupakan salah satu bentuk pengurangan masalah kemiskinan dan lebih jauh lagi merupakan bentuk perluasan bantuan sosial pemerintah di Kota Sumenep. Mengingat hasil pertemuan dengan Bantuan Sosial Kota Sumenep sebagai pelaksana strategi meringankan kebutuhan ini dan pertemuan dengan individu yang bertanggung jawab atas program pengentasan kemiskinan di Peraturan Sumenep dan pejabat sebagai pelaksana khusus program ini dan selanjutnya bertemu dengan Sumenep Kelompok masyarakat aturan, khususnya PMKS sebagai tujuan dari program penanggulangan kemiskinan, diyakini pelonggaran Kemiskinan di Pemerintahan Sumenep, Wilayah Jawa Timur dapat berjalan dengan nyata. Dari hasil pertemuan, para ahli mendapat data bahwa untuk Bantuan Sosial Perda Sumenep, jelas ada manfaat yang didapat. Jadi, dari hasil penelitian di atas, penulis menginterpretasikan bahwa ada manfaat yang signifikan yang diperoleh oleh pihak Dinas Sosial. Demikian juga manfaat adanya kebijakan pengentasan kemiskinan ini dirasakan oleh masyarakat untuk menaikkan kesejahteraan sosial mereka

1.3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Kebijakan tidak dapat diangkat dari subjek yang akan diperoleh, yang perlu saya pahami dalam poin ini adalah bahwa terlepas dari seberapa banyak perubahan yang perlu Anda capai dari Implementasi pendekatan, itu harus memiliki skala yang tepat. Beberapa keuntungan secara langsung terkait dengan perbedaan normal dalam suatu pengaturan. Sebuah pendekatan yang terlalu memaksakan penyesuaian sikap dan perilaku besar akan lebih menantang untuk dilakukan. Selain itu, strategi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang akan mengalami masalah dalam interaksi Implementasi dibandingkan dengan pendekatan yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan. Motivasi di balik pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini tergantung pada tingginya tingkat kebutuhan di Kota Sumenep. Program pengentasan kemiskinan ini bergantung pada Peraturan Daerah Provinsi (PERDA) Sumenep Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah di Kota Sumenep. Motivasi di balik pelaksanaan bantuan sosial pemerintah adalah untuk menjamin pelaksanaan pelayanan bantuan sosial pemerintah secara terkoordinasi, terpadu dan dikelola, yang diselesaikan oleh otoritas publik, Provinsi dan daerah setempat, dengan melihat pengaturan peraturan. Dan pedoman. Penyelenggaraan bantuan sosial pemerintah, dimaksudkan untuk mewujudkan bantuan pemerintah yang adil dan merata, kualitas dan daya tahan daerah, membangun kembali kapasitas sosial untuk mencapai kebebasan daerah, meningkatkan fleksibilitas sosial daerah dalam mencegah dan mengelola masalah bantuan sosial pemerintah, peningkatan kapasitas, kepedulian dan kewajiban sosial dunia usaha dalam pelaksanaan bantuan pemerintah. Secara sosial secara terorganisir dan layak, memperluas kapasitas dan perhatian daerah dalam pelaksanaan bantuan sosial pemerintah secara standar dan praktis; dan bekerja pada sifat eksekutif

organisasi bantuan pemerintah sosial. Mengingat konsekuensi dari eksplorasi yang dipimpin, sesuai dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep perubahan yang ingin dicapai dengan adanya program pengentasan kemiskinan ini adalah untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Sumenep. Perubahan yang diharapkan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, namun adanya program gerakan pengentasan kemiskinan ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih giat bekerja. Derajat perubahan dengan adanya program gerakan pengentasan kemiskinan dari pemerintah mempunyai tujuan yang baik yaitu adalah untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep. Program kebijakan pengentasan kemiskinan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingginya jumlah angka kemiskinan yang ada, untuk perubahan yang dirasakan masyarakat dengan adanya program pengentasan kemiskinan yaitu adanya bantuan dari pemerintah berupa bansos dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat itu sendiri dan salah satu upaya yang dilakukan pihak gerakan pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial.

1.4. Letak Pengambilan Keputusan

Pergi dengan pilihan dari suatu strategi memiliki usaha yang signifikan dalam melakukan suatu pengaturan. Oleh karena itu, pada bagian ini, penting untuk memahami area penentuan pilihan dalam pendekatan yang akan dilakukan. Mengejar pilihan terkait dengan mitra di mana setiap gerakan atau program harus sesuai dengan pengaturan dan pedoman materi dan pilihan yang diambil juga terkait dengan kepentingan normal. Pengambilan keputusan dalam suatu pendekatan memainkan peran penting dalam menentukan kemajuan suatu program kebijakan. Substansi pendekatan akan mendorong posisi yang dinamis. Pendekatan dalam bidang tertentu dipilih oleh berbagai unit pembuat strategi juga strategi pasti yang masih dimunculkan oleh berbagai unit pembuat strategi. Konsekuensi dari kuantitas pemimpin adalah semakin banyak pertanyaan, semakin merepotkan dalam menjalankan strategi. Demikian pula halnya dengan program penanggulangan kemiskinan ini, dimana program keringanan kemiskinan ini diciptakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep sebagai bentuk tanggung jawab membangun kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis menginterpretasikan bahwa indikator pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan ini sesuai dengan peraturan – peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

1.5. Pelaksana Program

Ketika penyelesaian suatu strategi atau tindakan yang harus dijunjung dengan adanya suatu pengaturan yang cakap dan terampil pelaksanaannya untuk kemajuan suatu pendekatan, maka hal ini harus efisien atau tercatat. Sebenarnya, proses pelaksanaan strategi tidak hanya menyangkut cara

berperilaku badan pengatur yang dipercayakan untuk menyelesaikan latihan atau proyek yang mengarah pada persetujuan dalam pengumpulan tujuan, tetapi juga kekuatan politik, keuangan dan sosial yang terhubung langsung. Dengan cara berperilaku semua perkumpulan termasuk yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan suatu perkumpulan. Pendekatan, baik negatif maupun positif. Implementasi program adalah bagian penting dari pendekatan karena Implementasi program adalah driver dan perangkat yang berencana untuk membuat kemajuan yang ditentukan sebelumnya menuju awal membuat pengaturan. Cenderung diartikan bahwa pelaksana adalah organisasi pemasok dan spesialis untuk daerah setempat dalam suatu gerakan atau program. Selain itu, pelaksanaan latihan juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam melihat sejauh mana suatu tindakan diselesaikan. Untuk mengetahui pelaksanaan Strategi Pelonggaran Kemiskinan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

1.6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan

Pelaksanaan suatu program harus didukung oleh sumber daya yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan lancar. Sumber daya tersebut menjadi kunci utama dalam kesuksesan dari tahapan pengimplementasian dari kebijakan suatu daerah. Jika isi dari suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas, namun apabila implementator kurang sumber daya untuk melakukan pelaksanaan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya ini dapat terwujud sebagai sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator, sumber daya finansial atau peralatan sarana/prasarana. Tanpa dukungan dari sumber daya, maka suatu kebijakan hanya menjadi data-data yang terpapar di atas kertas saja. Pada saat pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan sumber daya yang bisa berkontribusi memberikan dukungan positif dan berguna dalam menjalankan kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan maupun sebuah program. Sumber daya yang memadai pastinya akan membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik, efektif, maksimal dan efisien. Pada bagian ini penulis ingin dijelaskan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep apakah didukung oleh sumber sumber-daya yang tepat, memadai atau tidak. Sebagai pelaksana kebijakan pengentasan kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah cukup memberikan fasilitas sumber daya sarana prasarana. Secara keseluruhan penulis menginterpretasikan bahwa isi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan indikator sumber-sumber yang digunakan dalam pengimplementasiannya sudah cukup memadai. Dimana idealnya bahwa sebuah kebijakan dapat berhasil dilaksanakan apabila didukung dari sumber daya-sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana prasarana. Pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep untuk sumber daya manusia dirasa sudah cukup baik.

1.7. Konteks Kebijakan

Terlepas dari kebijakan strategi yang merupakan social dalam menentukan hasil dari pelaksanaan suatu strategi, pengaturan pendekatan juga merupakan sudut pandang kebijakan signifikan dalam menentukan kemajuan pelaksanaan strategi. Kebijakan pengaturan tersebut umumnya dipandang sebagai komponen penting, mengingat efek asli atau potensial akan bergantung pada social, moneter, dan dunia politik. Semua pendekatan juga harus mempertimbangkan iklim dan pengaturan di mana organisasi dilakukan. Setiap kali pelaksanaan pendekatan tersebut berlanjut, banyak berbeda yang terkait dengan strategi tersebut, misalnya penyusunan, pembuat undang-undang dari berbagai tingkatan, target kumpul, elit moneter dan pelaksana. Berdasarkan hipotesis Grindle, ada tiga macam penanda yang penting untuk atau bagian dari pengaturan ini, termasuk: (1) kekuatan, kepentingan, dan elemen yang bersangkutan; (2) atribut perusahaan dan spesialis; (3) konsistensi dan daya tanggap. Pengaturan strategi juga harus diperhatikan dalam melakukan suatu perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan suatu pendekatan. Sesuai hipotesis Implementasi Merilee S. Grindle, pengaturan pengaturan adalah komponen yang menentukan kemajuan Implementasi strategi.

2.1. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan Dan Program Atau Strategi Dari Aktor Yang Terlibat.

Pada suatu kebijakan perlu memperhatikan kekuatan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan juga program yang digunakan oleh para subjek, bertujuan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, maka kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan dengan baik. Pelaksanaan dari suatu kebijakan akan berpengaruh dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para pimpinan, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksanaan bahkan juga subjek lain di luar itu baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sumenep merupakan implementor dari program pengentasan kemiskinan ini dan pelaksana program ini adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dan masyarakat menjadi sasaran dari kebijakan ini. Tidak adanya strategi yang cukup efektif yang lakukan pihak dinas untuk keberhasilan program kebijakan pengentasan kemiskinan dikarenakan letak dan jarak tempat yang susah dijangkau. Jadi dapat dinyatakan bahwa strategi yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk keberhasilan program kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Kurang berjalan efektif dikarenakan lokasi dan jarak yang sulit dijangkau.

2.2. Karakteristik Dari Lembaga Dan Kota Yang Berkuasa

Dimana suatu perjanjian akan dilaksanakan juga akan mempengaruhi

kemakmurannya, selanjutnya dalam segmen ini dijelaskan tentang ciri-ciri yayasan yang bersangkutan dengan suatu pendekatan. Dalam pelaksanaan yang dibuat, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari pelaksana pengaturan yang sebenarnya. Kualitas rekanan untuk situasi ini sesuai dengan kewajiban dan direktur masing-masing kantor atau kantor yang berlaku dalam menyelesaikan kewajibannya. Seperti halnya program strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep Wilayah Jawa Timur, dalam pelaksanaannya terdapat perkumpulan-perkumpulan terkait yang terlibat dalam pelaksanaannya, misalnya Bantuan Sosial Kota Sumenep, unit-unit pelaksana dan jejaring yang menjadi tujuan dari program strategi keringanan kebutuhan ini. Sekarang, ilmuwan melihat tugas dari Bansos Daerah Sumenep sebagai pelaksana program strategi pengentasan kemiskinan, bagaimana presentasi Bansos Daerah Sumenep dalam menjalankan program strategi pengentasan kemiskinan, dan bagaimana masyarakat umum menilai mentalitas pekerja di program strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan Sumenep. Melihat dampak dari peninjauan tersebut, disadari bahwa Bantuan Sosial Pemkab Sumenep sangat mempengaruhi kelancaran program ini, bantuan disini berperan untuk bekerja dengan terlaksananya program strategi pengentasan kemiskinan ini. Jalannya program strategi mitigasi kemiskinan di Kota Sumenep juga dipengaruhi oleh sikap para pekerja yang melayani daerah, bagaimana disposisi perwakilan bansos dalam menyambut dan membaurkan program-program strategi pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk memajukan program kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep. Sikap pegawai program kebijakan pengentasan kemiskinan pada saat melayani masyarakat dikatakan cukup baik. Secara umum, para pencipta mengartikan bahwa pengaturan program strategi pengentasan kemiskinan dengan ciri-ciri lembaga yang berkuasa dalam pelaksanaannya sangat baik. Dimana pengawasan dilakukan oleh kantor-kantor yang terkait dengan program pengembangan strategi pelonggaran kebutuhan dinilai cukup efektif, ditambah lagi sikap pegawai dinas sosial dinilai cukup baik.

2.3. Tingkat Kepatuhan Dan Adanya Respon Para Pelaksana

Pengaturan mendasar dari pendekatan ini adalah tanda tingkat kapasitas dan reaksi dari dua pejabat atau pelaksana strategi yang sama pentingnya dalam menentukan siapa yang mengeksekusinya, tingkat konsistensi dan reaksi dari pelaksana strategi adalah jenis kepentingan yang akan mempengaruhi kemajuan pelaksanaan pengaturan. Merille S Grindle mengatakan bahwa tanda terakhir dari suatu pendekatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh derajat reaksi dan ketundukan pelaksana untuk menjawab suatu strategi. Pada segmen ini perlu dimaknai sejauh mana tingkat konsistensi dan ketanggapan para pelaksana strategi pengentasan kemiskinan, dengan melalui ketanggapan ini cenderung dievaluasi sejauh mana para pelaksana mendukung strategi pelonggaran kebutuhan. Perkembangan. Mengingat dampak dari tinjauan tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat konsistensi individu Pemerintah Sumenep untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam mendukung program-program strategi pengentasan

kemiskinan tidak cukup.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Faktor Pendukung

1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini menyangkut tentang kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dinas sosial yang dari analisis yang sudah dibahas sebelumnya dapat dilihat bahwa kemampuan setiap petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berjalan secara maksimal dilihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa sikap dari petugas sudah cukup baik. Kemudian dari Dinas Sosial Kabupaten Sumenep juga dirasa juga sudah cukup baik dimana sesuai dari hasil wawancara terhadap pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumenep selain memberi fasilitas mereka juga melakukan pengawasan dalam jalannya program kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

1.2. Fasilitas

Dalam penerapan kebijakan tentunya fasilitas menjadi 74ocial penting yang akan menentukan kebijakan itu akan berhasil atau tidak. Pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan ini penulis melihat fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep sudah cukup lengkap, mulai alat transportasi untuk menyalurkan bantuan Sosial seperti mobil dinas. Dalam hal ini tentunya dirasa sudah cukup baik, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menyediakan berbagai hal atau fasilitas guna mendukung kelancaran program ini.

2. Faktor Penghambat

2.1. Masyarakat

Masyarakat selaku sasaran dari program kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi penghambat dikarenakan masih kurangnya tertib administrasi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya registrasi atau pengajuan dari masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Tentu hal ini akan menjadikan tidak validnya data, serta tidak meratanya pembagian bantuan sosial oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu disini penulis membuat masyarakat menjadi penghambat dari program kebijakan pengentasan kemiskinan.

2.2. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi atau wilayah di Daerah Kabupaten Sumenep terdiri dari beberapa pulau, hal itu menyebabkan sulit penyuplaian bantuan sosial dari Pemerintah Daerah ke tempat-tempat plosok dikarenakan alat transportasi yang kurang memadai.

3.3. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dari implementasi Kebijakan program Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.

Didalam setiap kebijakan selalu ada titik lemah atau kelemahan, hal ini tentunya menjadi tantangan dari dinas terkait untuk bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Sumenep selalu berupaya agar program ini terus berjalan, sesuai dari kelemahan yang penulis sebutkan yakni kurangnya kesadaran atau respon masyarakat terkait program kebijakan pengentasan kemiskinan ini, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep tentunya akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya program ini selain mengurangi tingginya angka kemiskinan namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep. Dan juga akan segera melengkapi fasilitas alat transportasi untuk mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sumenep guna memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Mengingat hasil pertemuan dengan Bantuan Sosial Kota Sumenep sebagai pelaksana strategi meringankan kebutuhan ini dan pertemuan dengan individu yang bertanggung jawab atas program pengentasan kemiskinan di Peraturan Sumenep dan pejabat sebagai pelaksana khusus program ini dan selanjutnya bertemu dengan Sumenep Kelompok masyarakat aturan, khususnya PMKS sebagai tujuan dari program penanggulangan kemiskinan, diyakini pelanggaran Kemiskinan di Pemerintahan Sumenep, Wilayah Jawa Timur dapat berjalan dengan nyata.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tentang Implementasi program gerakan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, dengan tiga pokok rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep sudah berjalan baik, namun belum maksimal dapat dilihat menurut teori Grindle, yakni :

a. Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Isi dari kebijakan program pengentasan kemiskinan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dikarenakan setelah ada program ini di Kabupaten Sumenep ada perubahan-perubahan yang lebih baik yang terjadi di Kabupaten Sumenep seperti kurun waktu 5 tahun terakhir menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep, kemudian dengan adanya program ini juga masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendapatan serta rumah-rumah yang dulunya kumuh telah tertata rapi. Namun untuk saat ini program kebijakan pengentasan kemiskinan belum berjalan secara efektif dikarenakan masih kurang

sadarnya masyarakat akan tertib administrasi, dan juga jarak serta lokasi-lokasi yang menjadi sasaran sulit dijangkau.

b. Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan dari proses terlaksananya program kebijakan pengentasan kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep telah melakukan upaya dalam gerakan pengentasan kemiskinan yaitu dengan kegiatan menyalurkan bantuan sosial selain itu sosialisasi tentang diadakannya bantuan sosial bagi peserta PMKS dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Namun upaya – upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang optimal karena masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa urusan administrasi atau pendataan dan penyaluran bantuan sosial yang merupakan tugas dari Pemerintah. Selain itu, masih kurangnya keasadaran masyarakat dalam mendukung program tersebut yang tentunya mempengaruhi tingkat kesuksesan pengimplementasian program kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut.

2. Dalam penerapan program kebijakan pengentasan kemiskinan tentunya memiliki beberapa faktor pendukung juga penghambat dalam pelaksanaannya, berupa:

a. Faktor Pendukung

- 1) Sumber daya manusia yang disiplin serta ramah kepada masyarakat
- 2) Fasilitas yang memadai guna kelancaran program kebijakan pengentasan kemiskinan

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat
- 2) Lokasi yang sulit dijangkau

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yakni: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya tertib administrasi guna lancarnya pendistribusian bantuan sosial untuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Pengentasan Kemiskinan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Nirwana, Adam. 2018. ANA LYSIS OF MSMES ENTREPRENEURS TAX COMPLIANCE RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF PP 23 OF 2018 (EMPIRICAL STUDY OF MSMES IN JABODETABEK).

Silitonga, Romaully Ferbiana. 2018. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI.

Janambani, Apinus. 2018 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHANMUJA-MUJU KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin



